

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada Desa Balaweling II dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pengelolaan keuangan desa di Desa Balaweling II baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sesuai asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Dalam tahapan perencanaan kuangan desa, Pemerintah Desa Balaweling II telah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan musdus dan musrembangdes sebelum penyusunan APBDesa dan juga adanya penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh kepala desa kepada bupati.
3. Dalam tahapan pelaksanaan, pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan setiap penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (buku bank) serta adanya pengeras suara (corong desa) untuk menyapaikan setiap pelaksanaan kegiatan di Desa Balaweling II.
4. Dalam tahapan penatausahaan, pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan

adanya buku kas umum yang dibuat oleh bendahara untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa yang berkaitan dengan pelaksanaan belanja desa serta buku bank desa (bank NTT) dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan (bendahara) Desa.

5. Dalam tahapan pelaporan, pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan telah laporan realisasi anggaran semester pertama dan semester akhir tahun yang dibuat oleh Pemerintah Desa Balaweling II.
6. Dalam tahapan pertanggungjawaban, pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini buktikan dengan adanya penyampain laporan realisasi anggaran semester pertama dan semester akhir tahun oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Pada Desa Balaweling II juga tersedia media informasi desa berupa pengeras suara, papan informasi desa dan pemasangan baliho tentang realisasi APBDesa.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Balaweling II, diharapkan tetap berpegang teguh terhadap peraturan yang dibuat untuk proses pengelolaan keuangan desa serta menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi, agar tidak terjadi lagi kasus penyelewengan atau penyalahgunaan dana.
2. Penelitian ini hanya membahas asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,

sehingga bagi peneliti selanjutnya untuk meambah asas partisipasi dalam penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Astuti, T.P., dan Yulianto. 2016. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Universitas Setia Budi Surakarta.
- Dewanti, E.D.W., Sudarno., dan Kurrohman, T. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Akuntansi, Universitas Jember.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Editor Agus Dwiyanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ismail, I., Widagdo., A.K., dan Widodo, A. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal*. Vol.12. No.2.
- Mahmudi, 2010, *manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta:ANDY Yogyakarta*.
- Muntahanah, S., dan Murdijaningsih, T. 2013. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Akuntansi, Universitas Wijayakusuma.
- Muslimin., Mappamiring., dan Nurmaeta, S. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal*. Vol.2. No.1.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20. 2018. *tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6. 2014. *tentang Desa*

Permendagri Nomor 20. 2018. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Sangki, A.A., Gosal, R., dan Kairupan J. 2016. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mangondow)

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sutopo, Aries Hadi,. Adrianus, Arief. 2010. *Terampil mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP.

Taufik, Taufeni. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Akuntansi, Universitas Riau.

Umami, R., dan Nurodin, I. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. *Jurnal* Vol 6. Edisi 11.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018, *tentang Desa*.